

SKRIPSI

**KESAHAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TANPA
REKOMENDASI DARI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA**



DISUSUN OLEH :

DWI PRASETYO

NIM: (02114133)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 10 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Soemali, SH., Mhum.

PROF. DR. H. MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama

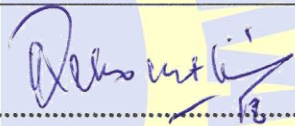




Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.


PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Dwi Prasetyo
N I M : 02114133
Tanggal Penilaian : 04 Agustus 2018
Judul Skripsi : Kesahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tanpa Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
Pembimbing : Soemali,SH.,MHum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

| DOSEN PENGUJI | NAMA | TANDA TANGAN |
|---------------|-----------------------------------|---|
| KETUA | TUTIK RETNOWATI,SH.,MHum. |  |
| SEKRETARIS | SOEMALI,SH.,MHum. |  |
| ANGGOTA | WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. |  |

Surabaya,
Pembimbing,


Soemali,SH.MHum.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Dwi Prasetyo

NIM. 02114133

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Kesahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tanpa Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Serta membahas tentang peranan dari Dewan Pengupahan yang ada diseluruh tingkatan baik itu Kabupaten/Kota dan Provinsi beserta Mekanisme Penetapan Upah Minimum yang ditetapkan setiap satu tahun sekali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan-pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik-teknik penelusuran bahan hukum adalah studi kepustakaan dan akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penetapan upah minimum kabupaten/kota, beserta tugas dan kewenangan dewan pengupahan baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dan prosedur penetapannya.

Pengupahan di Indonesia diatur didalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana didalam aturan tersebut jelas bahwa upah ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini Pekerja/Buruh.

Kata Kunci : Kesahan Penetapan Upah, Dewan Pengupahan, Mekanisme Penetapan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the determination of minimum wage regency/city without recommendation from regency/city wage council. As well as discussing the roles of the existing wage councils at all levels of both districts and provinces together with the minimum wage setting mechanisms established every once a year.

This research is a normative legal research with approaches of law and conceptual approach. Types of materials used are primary legal materials, secondary law materials, and tertiary legal materials. Techniques of legal material search techniques are literature study and internet access. The analysis of legal materials used is with legal systematic analysis using legal principles and legal provisions relating to district minimum wage determination mechanisms, along with the duties and authorities of the wage councils both at the regency/city and provincial levels and its determination procedures.

The remuneration in Indonesia is regulated in the law no. 13/2003 on employment juncto government regulation no. 78/2015 concerning wage. Where in the rule it is clear that wages are intended for the greatest prosperity of the people in this case workers/labors.

Keywords : Wage determination, wage council, determination mechanism.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|----------------------------------|------|
| LEMBAR PERSYARATAN GELAR..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| 1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah..... | 1 |
| 1.2 Penjelasan Judul..... | 7 |
| 1.3 Alasan Pemilihan Judul..... | 10 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 12 |
| 1.6.1 Pendekatan Masalah..... | 12 |
| 1.6.2 Sumber Bahan Hukum..... | 13 |
| 1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..... | 15 |
| 1.6.4 Analisa Bahan Hukum..... | 15 |
| 1.6.7 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 16 |

BAB II KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

| | |
|--|----|
| 2.1 Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota..... | 18 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 2.2 Wewenang Dewan Pengupahan dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota..... | 31 |
|---|----|

**BAB III AKIBAT HUKUM PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA TANPA ADANYA REKOMENDASI
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA**

| | |
|---|----|
| 3.1 Mekanisme Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota..... | 43 |
| 3.2 Akibat Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tanpa Rekomendasi Dewan Pengupahan..... | 50 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 54 |
| 4.2 Saran..... | 54 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Peran dewan pengupahan baik itu dewan pengupahan kabupaten/kota maupun dewan pengupahan propinsi sangatlah penting didalam merumuskan upah minimum. Dewan pengupahan haruslah menjadi jembatan antara penyedia kerja dengan pekerja. Karena apabila upah terlalu tinggi maka akan memberatkan pengusaha dan apabila terlalu rendah maka akan merugikan pekerja. Hendaknya sesuai dengan regulasi pemerintah sebagai titik tengah. Serta dewan pengupahan dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan sistem pengupahan sehingga tercipta iklim dunia usaha yang kondusif.
2. Apabila mencermati tugas dan wewenang dewan pengupahan didalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalam Pasal 98 ayat (1) maka tugas dan wewenang dewan pengupahan adalah sebatas memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur.

4.2. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur harus tetap menerbitkan Surat Edaran Gubernur dalam hal penentuan survey komponen hidup layak sesuai dengan tren dimana terdapat kenaikan harga bahan pokok atau

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Zulkarnrsiutasain Ibrahim, *Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif*, Dinamika Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Martha I Finney, *Cara Pintar Membuat Karyawan Mencurahkan Kemampuan Terbaik untuk Perusahaan*, PPM Manajemen Jakarta, 2006, hal 68.
- Munawir Haris, *Pedoman Pengupahan Manufaktur*, Edisi Pertama, PPM Manajemen, Jakarta, 2014.
- Hasibuan, *Managemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Liberty, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Abdul Rachmad Budiono, *Makna Perintah sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, J urnal FH Universitas Brawijaya, Malang, Volumem 23, 2009
- Agusmidah dkk, *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Ed 1*. Pustaka Larasan, Jakarta, 2012.
- Muhammad Junaidi, *Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Jakarta, 2016.

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor. 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara